



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017

TENTANG

**KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan provinsi pemekaran mempengaruhi kesetaraan kepemilikan kepengurusan partai politik di seluruh provinsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa pembentukan provinsi pemekaran mempengaruhi kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) kepemilikan kepengurusan partai politik di kabupaten/kota pada provinsi pemekaran dan provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa pembentukan kabupaten/kota pemekaran pada suatu provinsi mempengaruhi kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) kepemilikan kepengurusan partai politik di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d serta untuk menegaskan pada tataran pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Bab V Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan . . .

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musirawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
19. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi;

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 470/9603/Dukcapil, tanggal 21 Agustus 2017, perihal Penyampaian Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dan Data Administrasi Wilayah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH . . .

- KETUJUH : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan masih memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, masing-masing beserta nama kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEBELAS : Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KESEPULUH, wajib menambah sejumlah kepengurusan tingkat kabupaten/

kota dan didaftarkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan kepada KPU Kabupaten/Kota.

KEDUABELAS : Dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS, dilakukan penelitian administrasi oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota serta verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGABELAS : Kepengurusan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	<div> <div>1 Kota Samarinda</div> <div>2 Kota Balikpapan</div> <div>3 Penajam Pasir Utara</div> <div>4 Paser</div> <div>5 Kutai Kertanegara</div> <div>6 Kutai Barat</div> <div>7 Bontang</div> <div>8 Kutai Timur</div> <div>9 Berau</div> <div>10 Bulungan</div> <div>11 Tana Tidung</div> <div>12 Nunukan</div> <div>13 Malinau</div> <div>14 Kota Tarakan</div> </div>	<div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> </div>	10	8	<div> <div>1 Kota Samarinda</div> <div>2 Kota Balikpapan</div> <div>3 Penajam Pasir Utara</div> <div>4 Paser</div> <div>5 Kutai Kertanegara</div> <div>6 Kutai Barat</div> <div>7 Bontang</div> <div>8 Kutai Timur</div> <div>9 Berau</div> <div>10 Makaham Ulu</div> </div>	<div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> </div>	<div> <div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.</div> <div>2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : <div> <div>1. Bulungan</div> <div>2. Tana Tidung</div> <div>3. Nunukan</div> <div>4. Malinau</div> <div>5. Kota Tarakan</div> </div> </div> <div>3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013.</div> <div>4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.</div> <div>5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.</div> </div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau # Bulungan # Tana Tidung # Nunukan # Malinau # Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Mahakam Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Paser Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Paser Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Kutai Kertanegara 4 Kutai Barat 5 Bontang 6 Kutai Timur 7 Berau 8 Bulungan 9 Tana Tidung 10 Nunukan 11 Malinau 12 Kota Tarakan	TMS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Kutai Kertanegara 4 Kutai Barat 5 Bontang 6 Kutai Timur 7 Berau 8 Makaham Ulu	BMS TMS TMS MS MS MS MS MS	<p>1 Dilakukan verifikasi faktual untuk paling sedikit 1 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur guna memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota karena baru memenuhi 7 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu :</p> <p>1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan</p> <p>3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013.</p> <p>4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.</p>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Bulungan 11 Tana Tidung 12 Nunukan 13 Malinau 14 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau # Bulungan # Tana Tidung # Nunukan # Malinau # Kota Tarakan	MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Samarinda 2 Kota Balikpapan 3 Penajam Pasir Utara 4 Paser 5 Kutai Kertanegara 6 Kutai Barat 7 Bontang 8 Kutai Timur 9 Berau 10 Makaham Ulu	MS MS MS MS MS MS MS TMS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di Provinsi Kalimantan Timur karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota dari 8 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. 2 4 Kabupaten dan 1 Kota semula menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU 20 Nomor Tahun 2012 menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu : 1. Bulungan 2. Tana Tidung 3. Nunukan 4. Malinau 5. Kota Tarakan 3 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2013. 4 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota yang diajukan tersebut yang semula masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah berpindah menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 5 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Utara.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5	4	1 Bulungan 2 Tana Tidung 3 Nunukan 4 Malinau 5 Kota Tarakan	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara karena telah memenuhi syarat sebaran 75 % jumlah kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 4 batas minimum syarat sebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. 2 Kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kota tersebut dinyatakan tetap memenuhi syarat administrasi dan faktual berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual pada masa pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2014.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barat 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 13 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 14 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	11	14	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng	MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS	15	12	1 Lampung Selatan 2 Lampung Tengah 3 Lampung Utara 4 Lampung Timur 5 Lampung Barata 6 Tulang Bawang 7 Way Kanan 8 Tanggamus 9 Pesawaran 10 Pringsewu 11 Tulang Bawang Barat 12 Mesuji 13 Metro 14 Bandar Lamupng 15 Pesisir Barat	MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 12 kabupaten/kota dari 12 batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	<div>1 Kota Palembang</div> <div>2 Kota Prabumulih</div> <div>3 Kota Pagar Alam</div> <div>4 Kota Lubuk Linggau</div> <div>5 Empat Lawang</div> <div>6 Ogan Komering Ulu</div> <div>7 Ogan Komering Ulu Selatan</div> <div>8 Ogan Komering Ulu Timur</div> <div>9 Ogan Komering Ulir</div> <div>10 Ogan Ilir</div> <div>11 Musi Rawas</div> <div>12 Muara Enim</div> <div>13 Lahat</div> <div>14 Banyuasin</div> <div>15 Musi Banyuasin</div>	MS	17	13	<div>1 Kota Palembang</div> <div>2 Kota Prabumulih</div> <div>3 Kota Pagar Alam</div> <div>4 Kota Lubuk Linggau</div> <div>5 Empat Lawang</div> <div>6 Ogan Komering Ulu</div> <div>7 Ogan Komering Ulu Selatan</div> <div>8 Ogan Komering Ulu Timur</div> <div>9 Ogan Komering Ulir</div> <div>10 Ogan Ilir</div> <div>11 Musi Rawas</div> <div>12 Muara Enim</div> <div>13 Lahat</div> <div>14 Banyuasin</div> <div>15 Musi Banyuasin</div> <div>16 Musirawas Utara</div> <div>17 Penukal Abab Lematang Ilir</div>	MS	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.</div> <div>2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan :</div> <div>a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013);</div> <div>b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).</div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS - MS - MS - MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	BMS MS MS - MS - MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	<div>1 Kota Palembang</div> <div>2 Kota Prabumulih</div> <div>3 Kota Pagar Alam</div> <div>4 Kota Lubuk Linggau</div> <div>5 Empat Lawang</div> <div>6 Ogan Komering Ulu</div> <div>7 Ogan Komering Ulu Selatan</div> <div>8 Ogan Komering Ulu Timur</div> <div>9 Ogan Komering Ulir</div> <div>10 Ogan Ilir</div> <div>11 Musi Rawas</div> <div>12 Muara Enim</div> <div>13 Lahat</div> <div>14 Banyuasin</div> <div>15 Musi Banyuasin</div>	MS	17	13	<div>1 Kota Palembang</div> <div>2 Kota Prabumulih</div> <div>3 Kota Pagar Alam</div> <div>4 Kota Lubuk Linggau</div> <div>5 Empat Lawang</div> <div>6 Ogan Komering Ulu</div> <div>7 Ogan Komering Ulu Selatan</div> <div>8 Ogan Komering Ulu Timur</div> <div>9 Ogan Komering Ulir</div> <div>10 Ogan Ilir</div> <div>11 Musi Rawas</div> <div>12 Muara Enim</div> <div>13 Lahat</div> <div>14 Banyuasin</div> <div>15 Musi Banyuasin</div> <div>16 Musirawas Utara</div> <div>17 Penukal Abab Lematang Ilir</div>	MS	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.</div> <div>2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan :<div>a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013);</div><div>b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).</div></div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	<div>1 Kota Palembang</div> <div>2 Kota Prabumulih</div> <div>3 Kota Pagar Alam</div> <div>4 Kota Lubuk Linggau</div> <div>5 Empat Lawang</div> <div>6 Ogan Komering Ulu</div> <div>7 Ogan Komering Ulu Selatan</div> <div>8 Ogan Komering Ulu Timur</div> <div>9 Ogan Komering Ulir</div> <div>10 Ogan Ilir</div> <div>11 Musi Rawas</div> <div>12 Muara Enim</div> <div>13 Lahat</div> <div>14 Banyuasin</div> <div>15 Musi Banyuasin</div>	MS	17	13	<div>1 Kota Palembang</div> <div>2 Kota Prabumulih</div> <div>3 Kota Pagar Alam</div> <div>4 Kota Lubuk Linggau</div> <div>5 Empat Lawang</div> <div>6 Ogan Komering Ulu</div> <div>7 Ogan Komering Ulu Selatan</div> <div>8 Ogan Komering Ulu Timur</div> <div>9 Ogan Komering Ulir</div> <div>10 Ogan Ilir</div> <div>11 Musi Rawas</div> <div>12 Muara Enim</div> <div>13 Lahat</div> <div>14 Banyuasin</div> <div>15 Musi Banyuasin</div> <div>16 Musirawas Utara</div> <div>17 Penukal Abab Lematang Ilir</div>	MS	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.</div> <div>2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan :<div>a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013);</div><div>b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).</div></div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 15 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15	11	15	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin	MS MS MS MS MS MS MS - MS MS MS TMS MS MS TMS	17	13	1 Kota Palembang 2 Kota Prabumulih 3 Kota Pagar Alam 4 Kota Lubuk Linggau 5 Empat Lawang 6 Ogan Komering Ulu 7 Ogan Komering Ulu Selatan 8 Ogan Komering Ulu Timur 9 Ogan Komering Ulir 10 Ogan Ilir 11 Musi Rawas 12 Muara Enim 13 Lahat 14 Banyuasin 15 Musi Banyuasin 16 Musirawas Utara 17 Penukal Abab Lematang Ilir	BMS MS MS MS MS MS MS - MS MS MS TMS MS MS TMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Musirawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan : a. Dari Kabupaten Musirawas yaitu Kabupaten Kab. Musirawas Utara (UU No. 16 Tahun 2013); b. Dari Kabupaten Muara Enim yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (UU No. 7 Tahun 2013).

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

 Sigit Joyowardono

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	<div>1 Bogor</div> <div>2 Sukabumi</div> <div>3 Cianjur</div> <div>4 Bandung</div> <div>5 Garut</div> <div>6 Tasikmalaya</div> <div>7 Ciamis</div> <div>8 Kuningan</div> <div>9 Cirebon</div> <div>10 Majalengka</div> <div>11 Sumedang</div> <div>12 Indramayu</div> <div>13 Subang</div> <div>14 Purwakarta</div> <div>15 Karawang</div> <div>16 Bekasi</div> <div>17 Bandung Barat</div> <div>18 Kota Bogor</div> <div>19 Kota Sukabumi</div> <div>20 Kota Bandung</div> <div>21 Kota Cirebon</div> <div>22 Kota Bekasi</div> <div>23 Kota Depok</div> <div>24 Kota Cimahi</div> <div>25 Kota Tasikmalaya</div> <div>26 Kota Banjar</div>	MS	27	21	<div>1 Bogor</div> <div>2 Sukabumi</div> <div>3 Cianjur</div> <div>4 Bandung</div> <div>5 Garut</div> <div>6 Tasikmalaya</div> <div>7 Ciamis</div> <div>8 Kuningan</div> <div>9 Cirebon</div> <div>10 Majalengka</div> <div>11 Sumedang</div> <div>12 Indramayu</div> <div>13 Subang</div> <div>14 Purwakarta</div> <div>15 Karawang</div> <div>16 Bekasi</div> <div>17 Bandung Barat</div> <div>18 Kota Bogor</div> <div>19 Kota Sukabumi</div> <div>20 Kota Bandung</div> <div>21 Kota Cirebon</div> <div>22 Kota Bekasi</div> <div>23 Kota Depok</div> <div>24 Kota Cimahi</div> <div>25 Kota Tasikmalaya</div> <div>26 Kota Banjar</div> <div>27 Pangandaran</div>	MS	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran.</div> <div>2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.</div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 26 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS	27	21	1 Bogor 2 Sukabumi 3 Cianjur 4 Bandung 5 Garut 6 Tasikmalaya 7 Ciamis 8 Kuningan 9 Cirebon 10 Majalengka 11 Sumedang 12 Indramayu 13 Subang 14 Purwakarta 15 Karawang 16 Bekasi 17 Bandung Barat 18 Kota Bogor 19 Kota Sukabumi 20 Kota Bandung 21 Kota Cirebon 22 Kota Bekasi 23 Kota Depok 24 Kota Cimahi 25 Kota Tasikmalaya 26 Kota Banjar 27 Pangandaran	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 25 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/ kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26		MS	27	21		MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena telah memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu memiliki 25 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran.
				1 Bogor	MS			1 Bogor	MS	2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.
				2 Sukabumi	MS			2 Sukabumi	MS	
				3 Cianjur	MS			3 Cianjur	MS	
				4 Bandung	MS			4 Bandung	MS	
				5 Garut	MS			5 Garut	MS	
				6 Tasikmalaya	MS			6 Tasikmalaya	MS	
				7 Ciamis	MS			7 Ciamis	MS	
				8 Kuningan	MS			8 Kuningan	MS	
				9 Cirebon	MS			9 Cirebon	MS	
				10 Majalengka	MS			10 Majalengka	MS	
				11 Sumedang	MS			11 Sumedang	MS	
				12 Indramayu	MS			12 Indramayu	MS	
				13 Subang	MS			13 Subang	MS	
				14 Purwakarta	MS			14 Purwakarta	MS	
				15 Karawang	MS			15 Karawang	MS	
				16 Bekasi	MS			16 Bekasi	MS	
				17 Bandung Barat	MS			17 Bandung Barat	MS	
				18 Kota Bogor	MS			18 Kota Bogor	MS	
				19 Kota Sukabumi	MS			19 Kota Sukabumi	MS	
				20 Kota Bandung	MS			20 Kota Bandung	MS	
				21 Kota Cirebon	MS			21 Kota Cirebon	MS	
				22 Kota Bekasi	MS			22 Kota Bekasi	MS	
				23 Kota Depok	MS			23 Kota Depok	MS	
				24 Kota Cimahi	TMS			24 Kota Cimahi	TMS	
				25 Kota Tasikmalaya	MS			25 Kota Tasikmalaya	MS	
				26 Kota Banjar	MS			26 Kota Banjar	MS	
								27 Pangandaran		

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI JAWA BARAT
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	20	26		MS	27	21		BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 20 kabupaten/kota yang MS dari 21 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pangandaran.
				1 Bogor	MS			1 Bogor	MS	2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012.
				2 Sukabumi	MS			2 Sukabumi	MS	
				3 Cianjur	TMS			3 Cianjur	TMS	
				4 Bandung	MS			4 Bandung	MS	
				5 Garut	MS			5 Garut	MS	
				6 Tasikmalaya	MS			6 Tasikmalaya	MS	
				7 Ciamis	MS			7 Ciamis	MS	
				8 Kuningan	MS			8 Kuningan	MS	
				9 Cirebon	MS			9 Cirebon	MS	
				10 Majalengka	MS			10 Majalengka	MS	
				11 Sumedang	TMS			11 Sumedang	TMS	
				12 Indramayu	TMS			12 Indramayu	TMS	
				13 Subang	TMS			13 Subang	TMS	
				14 Purwakarta	TMS			14 Purwakarta	TMS	
				15 Karawang	MS			15 Karawang	MS	
				16 Bekasi	MS			16 Bekasi	MS	
				17 Bandung Barat	MS			17 Bandung Barat	MS	
				18 Kota Bogor	MS			18 Kota Bogor	MS	
				19 Kota Sukabumi	MS			19 Kota Sukabumi	MS	
				20 Kota Bandung	MS			20 Kota Bandung	MS	
				21 Kota Cirebon	MS			21 Kota Cirebon	MS	
				22 Kota Bekasi	MS			22 Kota Bekasi	MS	
				23 Kota Depok	MS			23 Kota Depok	MS	
				24 Kota Cimahi	TMS			24 Kota Cimahi	TMS	
				25 Kota Tasikmalaya	MS			25 Kota Tasikmalaya	MS	
				26 Kota Banjar	MS			26 Kota Banjar	MS	
								27 Pangandaran		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	<div>1 Kota Kupang</div> <div>2 Kupang</div> <div>3 Timor Tengan Selatan</div> <div>4 Timor Tengah Utara</div> <div>5 Belu</div> <div>6 Alor</div> <div>7 Lembata</div> <div>8 Flores Timur</div> <div>9 Sikka</div> <div>10 Ende</div> <div>11 Nagekeo</div> <div>12 Ngada</div> <div>13 Manggarai Timur</div> <div>14 Manggarai</div> <div>15 Manggarai Barat</div> <div>16 Sumba Timur</div> <div>17 Sumba Tengah</div> <div>18 Sumba Barat</div> <div>19 Sumba Barat Daya</div> <div>20 Rote Ndao</div> <div>21 Sabu Raijua</div>	MS	22	17	<div>1 Kota Kupang</div> <div>2 Kupang</div> <div>3 Timor Tengan Selatan</div> <div>4 Timor Tengah Utara</div> <div>5 Belu</div> <div>6 Alor</div> <div>7 Lembata</div> <div>8 Flores Timur</div> <div>9 Sikka</div> <div>10 Ende</div> <div>11 Nagekeo</div> <div>12 Ngada</div> <div>13 Manggarai Timur</div> <div>14 Manggarai</div> <div>15 Manggarai Barat</div> <div>16 Sumba Timur</div> <div>17 Sumba Tengah</div> <div>18 Sumba Barat</div> <div>19 Sumba Barat Daya</div> <div>20 Rote Ndao</div> <div>21 Sabu Raijua</div> <div>22 Malaka</div>	MS	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka.</div> <div>2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.</div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 20 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS - MS - MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS - MS - MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 17 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 20 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

**SERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 21 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	<div> <div>1 Kota Kupang</div> <div>2 Kupang</div> <div>3 Timor Tengan Selatan</div> <div>4 Timor Tengah Utara</div> <div>5 Belu</div> <div>6 Alor</div> <div>7 Lembata</div> <div>8 Flores Timur</div> <div>9 Sikka</div> <div>10 Ende</div> <div>11 Nagekeo</div> <div>12 Ngada</div> <div>13 Manggarai Timur</div> <div>14 Manggarai</div> <div>15 Manggarai Barat</div> <div>16 Sumba Timur</div> <div>17 Sumba Tengah</div> <div>18 Sumba Barat</div> <div>19 Sumba Barat Daya</div> <div>20 Rote Ndao</div> <div>21 Sabu Raijua</div> </div>	MS	22	17	<div> <div>1 Kota Kupang</div> <div>2 Kupang</div> <div>3 Timor Tengan Selatan</div> <div>4 Timor Tengah Utara</div> <div>5 Belu</div> <div>6 Alor</div> <div>7 Lembata</div> <div>8 Flores Timur</div> <div>9 Sikka</div> <div>10 Ende</div> <div>11 Nagekeo</div> <div>12 Ngada</div> <div>13 Manggarai Timur</div> <div>14 Manggarai</div> <div>15 Manggarai Barat</div> <div>16 Sumba Timur</div> <div>17 Sumba Tengah</div> <div>18 Sumba Barat</div> <div>19 Sumba Barat Daya</div> <div>20 Rote Ndao</div> <div>21 Sabu Raijua</div> <div>22 Malaka</div> </div>	BMS	<div> <div>1 dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 16 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka.</div> <div>2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.</div> </div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS - MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS -	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS - MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS -	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 19 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	16	21	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua	MS MS MS MS MS MS MS TMS - MS MS MS MS MS MS - MS MS MS MS MS MS	22	17	1 Kota Kupang 2 Kupang 3 Timor Tengan Selatan 4 Timor Tengah Utara 5 Belu 6 Alor 7 Lembata 8 Flores Timur 9 Sikka 10 Ende 11 Nagekeo 12 Ngada 13 Manggarai Timur 14 Manggarai 15 Manggarai Barat 16 Sumba Timur 17 Sumba Tengah 18 Sumba Barat 19 Sumba Barat Daya 20 Rote Ndao 21 Sabu Raijua 22 Malaka	MS MS MS MS MS MS TMS - MS MS MS MS MS MS - MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 18 kabupaten/kota dari 17 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Belu yaitu Kabupaten Malaka berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2013.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

 Sigit Joyowardono

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	<div>1 Mamuju</div> <div>2 Majene</div> <div>3 Polman</div> <div>4 Mamasa</div> <div>5 Mamuju Utara</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	6	5	<div>1 Mamuju</div> <div>2 Majene</div> <div>3 Polman</div> <div>4 Mamasa</div> <div>5 Mamuju Utara</div> <div>6 Mamuju Tengah</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah.</div> <div>2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.</div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS - MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	BMS MS MS MS - MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 4 kabupaten/kota yang MS dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS TMS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	BMS MS MS TMS MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 4 kabupaten/kota yang MS dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	<div>1 Mamuju</div> <div>2 Majene</div> <div>3 Polman</div> <div>4 Mamasa</div> <div>5 Mamuju Utara</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	6	5	<div>1 Mamuju</div> <div>2 Majene</div> <div>3 Polman</div> <div>4 Mamasa</div> <div>5 Mamuju Utara</div> <div>6 Mamuju Tengah</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah.</div> <div>2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.</div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI BARAT
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	4	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara	MS MS MS MS MS	6	5	1 Mamuju 2 Majene 3 Polman 4 Mamasa 5 Mamuju Utara 6 Mamuju Tengah	MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 5 kabupaten/kota dari 5 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah. 2 Terdapat 1 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mamuju yaitu Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	<div>1 Kota Palu</div> <div>2 Donggala</div> <div>3 Poso</div> <div>4 Morowali</div> <div>5 Tojo Una-Una</div> <div>6 Banggai</div> <div>7 Banggai Kepulauan</div> <div>8 Tolitoli</div> <div>9 Buol</div> <div>10 Sigi</div> <div>11 Parigi Moutong</div>	MS	13	10	<div>1 Kota Palu</div> <div>2 Donggala</div> <div>3 Poso</div> <div>4 Morowali</div> <div>5 Tojo Una-Una</div> <div>6 Banggai</div> <div>7 Banggai Kepulauan</div> <div>8 Tolitoli</div> <div>9 Buol</div> <div>10 Sigi</div> <div>11 Parigi Moutong</div> <div>12 Banggai Laut</div> <div>13 Morowali Utara</div>	MS	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara.</div> <div>2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.</div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS TMS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 10 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 10 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong	MS MS MS MS MS MS MS - MS MS	13	10	1 Kota Palu 2 Donggala 3 Poso 4 Morowali 5 Tojo Una-Una 6 Banggai 7 Banggai Kepulauan 8 Tolitoli 9 Buol 10 Sigi 11 Parigi Moutong 12 Banggai Laut 13 Morowali Utara	MS MS MS MS MS MS MS - MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 10 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2013 dan dari Kabupaten Morowali yaitu Kabupaten Morowali Utara berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	<div>1 Kota Kendari</div> <div>2 Konawe Selatan</div> <div>3 Konawe</div> <div>4 Konawe Utara</div> <div>5 Kolaka</div> <div>6 Kolaka Utara</div> <div>7 Muna</div> <div>8 Baubau</div> <div>9 Buton</div> <div>10 Buton Utara</div> <div>11 Bombana</div> <div>12 Wakatobi</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	17	13	<div>1 Kota Kendari</div> <div>2 Konawe Selatan</div> <div>3 Konawe</div> <div>4 Konawe Utara</div> <div>5 Kolaka</div> <div>6 Kolaka Utara</div> <div>7 Muna</div> <div>8 Baubau</div> <div>9 Buton</div> <div>10 Buton Utara</div> <div>11 Bombana</div> <div>12 Wakatobi</div> <div>13 Buton Selatan</div> <div>14 Buton Tengah</div> <div>15 Muna Barat</div> <div>16 Konawe Kepulauan</div> <div>17 Kolaka Timur</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	<div>1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur.</div> <div>2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara :<div><div>a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014).</div><div>b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014).</div><div>c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013).</div><div>d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).</div></div></div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

[illegible]

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS 	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	MS 	<p>1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur.</p> <p>2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

[illegible]

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI PAPUA TENGGARA
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS 	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS 	<p>1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur.</p> <p>2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	MS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 12 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	9	12	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi	MS MS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS TMS	17	13	1 Kota Kendari 2 Konawe Selatan 3 Konawe 4 Konawe Utara 5 Kolaka 6 Kolaka Utara 7 Muna 8 Baubau 9 Buton 10 Buton Utara 11 Bombana 12 Wakatobi 13 Buton Selatan 14 Buton Tengah 15 Muna Barat 16 Konawe Kepulauan 17 Kolaka Timur	BMS MS MS MS MS TMS MS MS MS MS TMS MS MS MS TMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 10 kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur. 2 Terdapat 5 kabupaten pemekaran di Provinsi Sulawesi Tenggara : a. Dari Kabupaten Buton yaitu Kab. Buton Selatan (UU No. 16 Tahun 2014) dan Kabupaten Buton Tengah (UU Nomor 15 Tahun 2014). b. Dari Kabupaten Muna yaitu Kabupaten Munda Barat (UU Nomor 14 Tahun 2014). c. Dari Kabupaten Konawe yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan (UU Nomor 13 Tahun 2013). d. Dari Kabupaten Kolaka yaitu Kabupaten Kolaka Timur (UU Nomor 8 Tahun 2013).

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	<div>1 Kota Ternate</div> <div>2 Kota Tidore Kepulauan</div> <div>3 Halmahera Barat</div> <div>4 Halmahera Utara</div> <div>5 Halmahera Tengah</div> <div>6 Halmahera Timur</div> <div>7 Halmahera Selatan</div> <div>8 Kepulauan Sula</div> <div>9 Pulau Morotai</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	10	8	<div>1 Kota Ternate</div> <div>2 Kota Tidore Kepulauan</div> <div>3 Halmahera Barat</div> <div>4 Halmahera Utara</div> <div>5 Halmahera Tengah</div> <div>6 Halmahera Timur</div> <div>7 Halmahera Selatan</div> <div>8 Kepulauan Sula</div> <div>9 Pulau Morotai</div> <div>10 Pulau Taliabu</div>	<div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div> <div>MS</div>	<div>1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu.</div> <div>2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.</div>

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS TMS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS TMS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS TMS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 8 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pulau Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 9 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI MALUKU UTARA
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	7	9	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai	MS MS MS MS MS MS TMS TMS	10	8	1 Kota Ternate 2 Kota Tidore Kepulauan 3 Halmahera Barat 4 Halmahera Utara 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Timur 7 Halmahera Selatan 8 Kepulauan Sula 9 Pulau Morotai 10 Pulau Taliabu	MS MS MS MS MS MS TMS TMS	1 Dilakukan verifikasi faktual karena belum memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu baru memiliki 7 kabupaten/kota yang MS dari 8 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Pualu Taliabu. 2 Terdapat satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula yaitu Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017
TENTANG KEDUDUKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NasDem)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrau 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrau 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI DEMOKRAT

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrau 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrau 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012.

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrau 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrau 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012 .

PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TERAKHIR PADA DAERAH OTONOM BARU MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019
PROVINSI PAPUA BARAT
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)

NO.	PEMILU 2014					PEMILU 2019				KETERANGAN
	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	JML KAB/KOTA YANG DIAJUKAN	NAMA KAB/KOTA	STATUS	JML KAB/KOTA	75 % KAB/KOTA	NAMA KAB/KOTA	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	8	11	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	13	10	1 Teluk Bintuni 2 Fak-Fak 3 Kaimana 4 Sorong 5 Manokwari 6 Maybrat 7 Raja Ampat 8 Sorong Selatan 9 Sorong 10 Tambrauw 11 Teluk Wondama 12 Manokwari Selatan 13 Pegunungan Arfak	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	1 Tidak dilakukan verifikasi faktual karena masih memenuhi syarat sebaran kabupaten/kota yaitu 11 kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. 2 Terdapat 2 kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2012 dan UU Nomor 24 Tahun 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono